

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dipercayakan untuk memegang peranan penting dalam perekonomian. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kasus-kasus yang merugikan perusahaan. Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance*. Di antaranya, Sistem *Regulatory* yang payah, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Berdasarkan keyakinan-keyakinan di atas, maka tidak mengherankan jika selama dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi sekaliber World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam *Good Corporate Governance* seperti *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern*, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian Negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional dan daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) biasa di singkat PTPN merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN sudah menerapkan *Good Corporate Governance* sejak tahun 2003 sesuai dengan peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 yang terakhir diperbaharui dengan PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Walaupun PTPN sudah menerapkan *Good Corporate Governance* selama 12 tahun, namun tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh insan di dalam perusahaan.

Permasalahan yang terjadi pada PTPN XIII yang di peroleh melalui wawancara secara langsung menyebutkan, proses gaji yang sering terlambat dan

tidak tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik dan akan mempengaruhi tercapainya efektivitas operasional perusahaan. Selain itu, absensi atau daftar hadir karyawan menggunakan absen paraf, padahal perusahaan sudah menyediakan absen sidik jari namun karyawan tidak menggunakan absen tersebut. Ini menggambarkan tingkat kedisiplinan yang kurang dan mutu karyawan yang tidak sesuai dengan tanggungjawabnya.

Menuru Akbar (2014), belum optimalnya kinerja BUMN antara lain disebabkan oleh belum terimplementasikannya *Good Corporate Governance* secara utuh diseluruh BUMN. Lemahnya implementasi *Good Corporate Governance* pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis, serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders*. Padahal, *Good Corporate Governance* sebagai suatu kebutuhan sesungguhnya memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang sehat.

2. *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana disebutkan di atas, wajar kiranya semua pelaku usaha di Indonesia, khususnya BUMN menyadari betapa pentingnya menerapkan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan.

Berangkat dari pemahaman mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* seperti disampaikan di atas, maka upaya memperkuat sistem pengendalian internal dalam organ BUMN menjadi pekerjaan yang tidak boleh ditunda. Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* yang entitas memerlukan pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan bagian integral dari sistem informasi akuntansi. Menurut Tunggal (2010), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan sebelas cara, di mana tiga di antaranya adalah membangun struktur sistem pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktifitas pengendalian dan meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu proses yang dijalankan untuk dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam perusahaan, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang dipenuhinya tujuan

pengendalian Ratnawati (2013). Adapun unsur-unsur dari pengendalian internal, yaitu: (a) Struktur Organisasi (b) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan (c) Praktik yang Sehat (d) Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggungjawab.

Pada penelitian ini membahas sistem pengendalian internal dalam lingkup unsur-unsur pengendalian internal (Mulyadi, 2009 :166) sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam unit - unit organisasi yang dibentuk sangat penting karena merupakan pengendalian untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan. Selain itu, dengan adanya pemisahan tanggung jawab fungsional, maka akan dapat dilakukan internal *check* di antara unit organisasi pelaksana.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dengan adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik dalam suatu perusahaan tentunya akan menjamin dihasilkannya informasi yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya yang dimiliki perusahaan itu sendiri.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Dalam pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara - cara untuk menjamin praktek yang sehat.

Adapun cara - cara umum yang ditempuh perusahaan dalam menciptakan

praktek yang sehat seperti penggunaan formulir bernomor urut tercetak, pemeriksaan mendadak, tidak adanya perangkapan tugas, adanya perputaran jabatan, adanya pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya, pembetulan staf intern.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya sistem, bila tidak ditunjang oleh kejujuran serta kecakapan karyawannya, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Agar memperoleh karyawan yang jujur dan cakap, hal yang perlu dilakukan manajemen adalah sewaktu dimulai dilakukannya penyaringan penerimaan karyawan baru dengan cara wawancara yang ketat mengenai latar belakang dan pengalaman-pengalaman dari pelamar.

Pendapat bahwa sistem pengendalian intern yang baik dapat mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elbannan (2008) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal menyebabkan *Good Corporate Governance* yang kuat. Pada penelitian ini membahas sistem pengendalian internal dalam lingkup unsur – unsur pengendalian internal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jalalludin (2012) dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukan

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap *good corporate governance*”.

Hasil yang sama juga ditunjukkan dari penelitian Pratolo (2007) bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan kinerja BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pada BUMN di Indonesia, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian internnya dalam rangka peningkatan penerapan *Good Corporate Governance*. Mardiasmo (2009) juga menguatkan bahwa *Good Corporate Governance* dapat diwujudkan melalui salah satunya pengendalian. Pengendalian dijelaskan Mardiasmo sebagai mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai.

Melihat pentingnya peranan sistem pengendalian internal dalam mencapai tingkat penerapan *Good Corporate Governance*, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini membahas sistem pengendalian internal dalam lingkup unsur-unsur pengendalian internal Mulyadi (2008), maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah struktur organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* ?.
2. Apakah wewenang dan prosedur pencatatan berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* ?.
3. Apakah praktek yang sehat berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* ?.
4. Apakah karyawan yang bermutu berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* ?.
5. Apakah struktur organisasi, wewenang dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat, dan karyawan yang bermutu secara bersama-sama berpengaruh terhadap *good corporate governance*?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada pengaruh unsur sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good corporate governance*. Adapun untuk mengukur pengaruh unsur sistem pengendalian internal adalah menggunakan struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab. Sedangkan, penerapan *good corporate governance* menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* hanya membahas pertanggungjawaban.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap penerapan *good corporate governance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh wewenang dan prosedur pencatatan terhadap penerapan prinsip *good corporate governance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh praktek yang sehat terhadap penerapan *good corporate governance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh karyawan yang bermutu terhadap penerapan *good corporate governance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, wewenang dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang bermutu secara bersama-sama berpengaruh terhadap *good corporate governance*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Memahami teori dan penerapan sistem pengendalian internal serta pengaruh dari penerapan sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good corporate governance*.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara menerapkan *good corporate governance*.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui karya ilmiah ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

Universitas Tanjungpura